

Menyegarkan Istilah Pesta Demokrasi

Oleh:

Gifari Juniatama

(Penulis dan Peneliti Independen)



Salah satu istilah paling lazim ditemui dalam setiap momentum pergantian kepemimpinan politik di Indonesia adalah “pesta demokrasi”. Pada umumnya, masyarakat menganggap bahwa istilah itu merupakan sesuatu yang lumrah dan normal. Namun, sebenarnya istilah populer tersebut memiliki beban politik dan lahir dari konteks sejarah yang perlu diingat kembali karena dampak yang ditimbulkannya dalam kehidupan sosial dan politik tidaklah kecil.

Dalam catatan John Pemberton (1986), istilah “pesta demokrasi” dipopulerkan untuk pertama kalinya pada pemilihan umum tahun 1982. Lebih tepatnya, diucapkan oleh Soeharto pada sebuah rapat nasional persiapan pemilu yang dihadiri oleh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Februari 1981. “Kita harus menganggap pemilihan umum sebagai sebuah pesta besar demokrasi”, ucap Soeharto kala itu.

Pers luar negeri menerjemahkan istilah pesta demokrasi sebagai “*festival of democracy*”. Bagi Pemberton, istilah tersebut terdengar dan terkesan aneh untuk digunakan dalam sebuah proses pemilihan di negara demokratis. Hingga saat ini, tampaknya tidak ada negara demokratis lain yang menyebut pemilihan umum di negeri mereka sebagai pesta demokrasi.

Berdasar pada anomali tersebut, Pemberton menyimpulkan bahwa makna yang terdapat dalam istilah pesta demokrasi sesungguhnya adalah “resepsi formal demokrasi”. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hadir setelah pemerintahan Orde Baru berhasil memenangkan pemilihan umum 1971 dan 1977 dan mendominasi kehidupan politik saat itu. Pemilu 1982 kemudian dianggap sekadar sebuah perayaan formal belaka untuk memeriahkan kembali kemenangan pemerintah yang berkuasa.

Pesta dalam persepsi kebudayaan Orde Baru sendiri bisa disamakan dengan pesta pernikahan. Pesta demokrasi seolah dirancang sudah memiliki susunan acara yang pasti dan hasil yang bisa diketahui lebih awal. Terdapat segala perangkat resepsi pesta seperti iringan musik yang meriah, dekorasi menawan, hidangan lezat, dan segala perangkat pesta yang sudah tertata, sedangkan masyarakat hanya ditempatkan sebagai tamu, menjadi saksi dan menikmati hiburan sesaat yang disajikan oleh pesta demokrasi. Setelah pesta selesai, tamu akan kembali pada kehidupan masing-masing tanpa terlibat secara langsung dalam kehidupan politik.

Dalam konteks kehidupan demokratis saat ini, dampak pandangan di atas dapat dilihat pada kehidupan demokrasi Indonesia yang berjalan sebatas prosedural saja. Demokrasi berjalan tidak secara substantif. Masyarakat umum hanya ditempatkan sebagai penggembira setiap lima tahun sekali sementara sebagian kecil elite politik dalam masyarakat terus mempertahankan status quo mereka yang dilegitimasi melalui pemilu.

Pesta dan kemeriahan selalu dihadirkan, mulai dari konser-konser penyanyi atau grup musik terkenal, sampai menghadirkan artis dan bintang film tenar dalam acara kampanye. Kekuatan politik masyarakat biasa dalam pemilihan umum perlahan hilang karena lebih sibuk mengikuti kemeriahan. Seharusnya, pemilu menjadi waktu paling ideal bagi masyarakat untuk mengoreksi kinerja pejabat publik yang tidak baik. Mereka yang terbukti bermasalah selama menempati jabatan yang berasal dari hasil pemilihan bisa untuk tidak dipilih kembali. Fungsi kontrol inilah yang luput dari proses pemilu yang lebih mengutamakan kemasan ketimbang isi. Pada sisi lain, kondisi seperti ini membuat para pejabat merasa semakin percaya diri untuk mengeluarkan kebijakan apa saja tanpa takut mendapat hukuman dari pemilih karena daya kritis masyarakat sudah dipadamkan lewat pemilu yang secara tidak sadar belum bisa lepas dari pengaruh budaya politik Orde Baru.

Keganjilan berdampak luas dalam istilah pesta demokrasi seperti yang dirasakan oleh Pemberton di atas sebenarnya adalah ciri yang umum ditemukan dalam bahasa politik di Indonesia. Benedict Anderson dalam *Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia* menilai bahwa bahasa politik Indonesia adalah campuran dari aneka ragam jenis bahasa yang tidak mudah dipahami, dipenuhi beban makna mulai dari ideologi, moral, budaya, hingga segala elemen ide lainnya yang membuatnya terkesan tidak masuk akal. Dengan kurang komunikatifnya bahasa politik yang dibuat oleh pemerintah, makna istilah bisa dimonopoli dengan relatif mudah. Praktik kebahasaan seperti ini mendapatkan kritik dari Daniel Dhakidae dalam *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Menurut Dhakidae, pejabat menikmati ketidaktahuan publik terhadap istilah-istilah yang dikeluarkan pemerintah. Kondisi itu menempatkan pejabat dalam hierarki tertinggi pengetahuan tentang istilah yang beredar di tengah masyarakat.

Pers dan berbagai media lainnya dalam hal ini bisa dilihat memainkan peran besar dalam menyebarkan istilah-istilah pemerintah yang jauh dari bahasa yang akrab dalam keseharian. Proses ini terus terjadi karena sumber informasi dan pengetahuan tentang istilah politik sering berasal dari pemerintah dan wartawan terpaksa menggunakan istilah yang diproduksi.

Dalam pandangan Ben Anderson, kebiasaan memproduksi istilah politik yang aneh berasal dari kesadaran feodalistik pada elite politik yang merasa panik dalam merespons masalah-masalah ekonomi, sosial, dan politik. Untuk kasus istilah pesta demokrasi, mungkin hal ini merupakan reaksi pemerintah Orde Baru terhadap perubahan gelombang demokrasi yang mengguncang stabilitas kekuasaan rezim. Oleh sebab itu, perlu dibuat istilah yang mengesankan bahwa demokrasi telah berjalan meskipun tidak sebagaimana mestinya.

Percakapan politik di Indonesia kemudian terjadi tanpa disertai pemahaman yang jelas terhadap istilah-istilah yang ada. Menyitir pendapat Sutan Takdir Alisjahbana, Dhakidae

menyebut bahwa bahasa dalam percakapan politik di negeri ini sebagai “kegirangan sahut-menyahut kicauan burung di hutan”. Bahasa yang diucapkan bisa jadi enak didengar, tetapi tanpa sadar menjadi istilah yang kurang dapat dipahami makna sebenarnya. Dengan demikian, istilah yang sudah hidup sejak masa Orde Baru tersebut perlu mendapat penyegaran atau mungkin saja tidak lagi digunakan. Penyegaran ini perlu karena setelah masyarakat Indonesia lepas dari kekuasaan Orde Baru melalui jalan reformasi, ternyata sisa kesadaran tentang praktik politik di masa itu masih saja tersisa.

Jika ingin tetap menggunakan istilah pesta demokrasi, perlu dilakukan pembebasan terhadap makna budaya pesta dari sudut pandang Orde Baru. Pesta demokrasi baru bisa dianggap sebuah perayaan ketika masyarakat memiliki kesadaran penuh tentang hak-hak politik mereka dalam pemilu. Jika hal tersebut sukar dilakukan, menghentikan pemakaian istilah pesta demokrasi mungkin merupakan sebuah langkah awal untuk memudarkan kebiasaan buruk dalam pelaksanaan demokrasi.

Perlu disadari bahwa bahasa adalah cerminan dari realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Di sisi lain, bahasa juga punya peran dalam membentuk realitas. Oleh sebab itu, melepaskan percakapan politik dari istilah yang dilahirkan oleh rezim Orde Baru yang sudah lama bangsa ini tinggalkan adalah sebuah usaha untuk memperbaiki budaya demokrasi kita. Masyarakat harus dibebaskan dari festivalisasi pemilu berbiaya tinggi yang melanggengkan kebiasaan koruptif dengan tujuan menutupi modal untuk memenangkan pemilu.